



STUDI KASUS

Pemetaan Budaya Acara Peringatan, Praktik-Praktik Terbaik, dan Pelajaran yang Diperoleh: *Aceh, Indonesia*



LATAR BELAKANG TENTANG PERIODE KEKERASAN

Konflik Aceh dimulai pada tahun 1976 setelah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyatakan kemerdekaan Aceh di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Pemerintah Republik Indonesia merespon situasi ini dengan melakukan serangkaian operasi militer dari tahun 1982 hingga 2005. Intensitas operasi militer ini meningkat signifikan pada periode 1989–1998 sebagaimana terlihat dari tingginya eskalasi konflik dengan pasukan GAM pada saat itu, yang menyebar ke tiga wilayah di sepanjang pantai timur Aceh, yaitu kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Ketiga wilayah tersebut juga merupakan wilayah yang memiliki potensi industri penting di negara ini.

Kontak bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) – sebelumnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) – dan kombatan GAM yang mengakibatkan beragam pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil. Penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan, dan penyiksaan terjadi secara meluas dan menjadi gambaran kehidupan sehari-hari warga Aceh. Pada tahun 1999, Forum Peduli HAM Aceh, sebuah LSM setempat, mencatat bahwa selama operasi militer tahun 1989–1998 terdapat sedikitnya 1.321 pembunuhan di luar proses hukum, 1.958 penghilangan paksa, 3.430 kasus penyiksaan, 128 kasus pemerkosaan, dan 597 kasus pembakaran harta benda.¹ Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memperkirakan bahwa hampir 30.000 orang terbunuh selama konflik, sebagian besar merupakan warga sipil.² Akan tetapi, laporan dari organisasi hak asasi manusia juga menyatakan bahwa pelanggaran HAM serupa selama konflik juga dilakukan oleh anggota GAM, terutama mereka yang dituduh

menjadi kolaborator atau informan bagi pemerintah Indonesia.³

Operasi militer diberlakukan di Aceh ketika militer Indonesia menyatakan bahwa wilayah Aceh ada di bawah kendali militer, yaitu di tahun 1989–1998 sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dan di tahun 2003–2004 melalui status Darurat Militer. Pelanggaran HAM massal terus terjadi. Pasukan keamanan menggunakan pos-pos militer dan tempat-tempat milik warga sipil sebagai lokasi interogasi, penahanan, kamp pengungsian, dan barak tentara. Di beberapa tempat, bangunan-bangunan besar misalnya rumah orang kaya, gudang, barak militer, sekolah, mesjid, pusat layanan kesehatan, atau lorong-lorong sekolah digunakan untuk lokasi penahanan dan penyiksaan.

Pencabutan status DOM terjadi di tahun 1998, bersamaan dengan hadirnya reformasi politik di tingkat nasional. Akan tetapi, “Reformasi 1998” ini tidak memecahkan masalah konflik di Aceh. Berbagai upaya untuk meningkatkan sistem politik dan penegakan hukum agar lebih demokratis hampir tidak menyentuh wilayah ini. Di saat yang sama, GAM melihat adanya kesempatan dalam “keterbukaan politik” sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatan pro-kemerdekaan di Aceh.

Sebaliknya, ada berbagai upaya untuk membangun dialog atau menghentikan kekerasan, termasuk melalui fasilitasi pihak ketiga dari dunia internasional. Di akhir 2004, bencana tsunami menghantam wilayah pantai Aceh, menewaskan hingga 200.000 orang dan menyebabkan kehancuran massal sesudahnya. Tsunami ini membuka peluang baru untuk melanjutkan resolusi konflik Aceh melalui negosiasi.⁴ Konflik bersenjata secara otomatis diakhiri. Perhatian dunia internasional meningkat drastis, terutama dalam hal bantuan kemanusiaan untuk memulihkan situasi pasca bencana. Bencana tsunami juga menjadi salah satu pemicu lahirnya perjanjian perdamaian (dikenal dengan nama Memorandum of Understanding/MoU

1 *Aceh, Perdamaian dengan Keadilan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, KontraS* (2006)

2 Craig Noble et al., *Multi Stakeholder Review of Post-Conflict Programming in Aceh: Identifying the Foundation for Sustainable Peace and Development in Aceh*, THE WORLD BANK, (Dec. 20019), dapat diakses di <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/857501468049458698/ringkasan-eksekutif>.

3 *Time to Face the Past: Justice for Past Abuses in Indonesia's Aceh Province*, Amnesty International, 2013, hal. 14-15 dan 18-19.

4 AJAR, Proses Perdamaian dan Keadilan Transisional di Indonesia <https://asia-ajar.org/resources/books-research/the-peace-process-and-transitional-justice-in-aceh-indonesia/>

Helsinki) antara pemerintah Indonesia dan GAM pada tanggal 5 Agustus 2005.

Setelah MoU Helsinki, Aceh menetapkan dirinya sebagai daerah otonomi istimewa berdasarkan “Syariat Islam” – seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 11/2006 mengenai pemerintah Aceh, yang menjadi kerangka hukum nasional untuk menerapkan MoU Helsinki - dengan cara mengembangkan sistem pemerintahan di berbagai sektor kehidupan. Langkah-langkah awal menuju perdamaian diikuti oleh pelucutan senjata terhadap para kombatan, demobilisasi militer Indonesia, dan reintegrasi para mantan kombatan ke dalam masyarakat sipil dari kedua sisi konflik. UU tadi secara parsial mengakui upaya untuk memenuhi hak para korban pelanggaran HAM dan untuk menuntut akuntabilitas atas kejahatan HAM masa lalu melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan HAM Aceh. Setelah penundaan panjang, pemerintah daerah Aceh mengesahkan sebuah peraturan lokal (qanun) untuk menetapkan berdirinya komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang permanen di Aceh tahun 2013. KKR Aceh ini mulai bekerja di tahun 2016 dan memiliki mandat untuk mengungkapkan kebenaran, memfasilitasi rekonsiliasi, dan merekomendasikan reparasi bagi para korban. Komisi ini, yang pembentukannya dijanjikan di dalam perjanjian perdamaian, dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat perdamaian baik di Aceh dan, di tingkat nasional, di Indonesia.⁵

LATAR BELAKANG YANG MENGAMBARAKAN TANGGAL ATAU PERISTIWA PENTING YANG DIPERINGATI

Dua pelanggaran masa lalu – yang sudah sangat dikenal oleh orang-orang di Aceh – akan digambarkan dalam sesi ini.

Lokasi-lokasi penyiksaan, Rumoh Geudong, Pidie, Aceh.

Rumoh Geudong adalah tempat penyiksaan dan pembunuhan yang paling diingat oleh orang-orang Aceh. Rumoh Geudong adalah rumah pribadi yang dimiliki seorang pemimpin lokal di Pidie, Aceh. Bangunannya berbentuk rumah panggung besar tipikal rumah tradisional Aceh dengan halaman luas, sehingga orang-orang menyebutnya Rumoh Geudong yang artinya rumah besar atau rumah orang kaya. Sejak tahun 1990 rumah tersebut diduduki oleh perwira militer dan digunakan sebagai pos Sattis Bilie Aron. Setelah operasi militer dicabut tahun 1998, ditemukan bahwa pihak berwenang menggunakan rumah tersebut tidak hanya sebagai pos Sattis tetapi juga sebagai tempat untuk melakukan tindak kekerasan di luar batas kemanusiaan terhadap orang-orang yang sering dituduh sebagai bagian dari gerakan “separatis” GAM, simpatisan dan keluarga yang dianggap mengetahui informasi tentang keberadaan GAM atau bahkan dituduh ikut menyediakan bantuan makanan bagi GAM. Akan tetapi, sebagian besar korban adalah warga sipil biasa yang bekerja sebagai petani atau ibu rumah tangga yang tidak mengetahui apapun tentang keberadaan para gerilyawan. Rumah ini dibakar oleh massa di tahun 1998 sehingga yang tersisa hanyalah reruntuhan.

Tindakan kekerasan dialami oleh warga sipil, tidak hanya para laki-laki tetapi juga perempuan dan anak-anak. Diperkirakan bahwa jumlah korban mencapai ribuan orang. Mereka ditangkap secara sewenang-wenang, tanpa prosedur hukum yang resmi, disiksa secara brutal, dan dibunuh. Banyak korban hilang dan makam mereka tidak diketahui keberadaannya. Dari kesaksian para saksi korban, diduga bahwa ada kuburan massal di tempat ini untuk menyembunyikan korban-korban yang dibunuh.⁶

Penyiksaan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pemukulan menggunakan tongkat atau senjata api, penyetruman, penelanjangan dan penyiksaan serta tindakan tidak bermartabat lainnya. Para korban yang sudah dilepas harus melakukan “wajib lapor” ke pejabat setempat secara teratur. Sejumlah perempuan mengalami tindakan

5 AJAR dan KontraS Aceh, Keadilan Transisional, Studi Kasus di Indonesia <https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2020/09/English-Indonesia-Case-Study.pdf>

6 Rumoh Geudong, Aceh Wound Signed, CORDOVA, 2001



kekerasan dan pelecehan seksual oleh personel militer. Banyak korban yang menderita luka fisik dan cacat tubuh akibat penyiksaan. Selain itu juga banyak korban, terutama perempuan, yang mengalami trauma dan gangguan psikologis.

“Setelah sampai di Rumoh Geudong saya langsung diikat dan wajah saya dibungkus plastik... Saya

diinterogasi dengan mata tertutup plastik dan tangan terikat di belakang punggung. Saya tidak tahu pertanyaan apa yang diajukan karena wajah saya diikat kencang, saya cuma mengangguk untuk tiap pertanyaan, saya tidak bisa bicara karena mulut saya tertutup plastik. Saya tidak bisa bernafas. Selain tidak bisa bernafas, saya juga ditendang di rusuk kiri dan kanan.. Pertanyaan dan pukulan datang bersamaan.”
Seorang penyintas dari Cot Baroh, Pidie.

Kasus ini sudah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) - sebuah lembaga yang bertugas menyelidiki dugaan adanya pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia - di tahun 2016. Dari kesaksian 65 korban, tim ad hoc Komnas HAM menyimpulkan bahwa sudah terdapat bukti-bukti awal yang cukup tentang adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap populasi warga sipil di Rumoh Geudong. Selain dari adanya pola yang tetap dan terorganisir, kekerasan ini terjadi secara kolektif, dalam skala besar, dan membawa konsekuensi serius bagi warga sipil. Komnas HAM juga merekomendasikan pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, baik militer maupun warga sipil.⁷ Kesimpulan ini tercantum dalam laporan penyelidikan pro-justisia yang diserahkan oleh Komnas HAM kepada Kantor Kejaksaan Agung Indonesia di bulan September 2018. Sebagaimana halnya rekomendasi lain untuk kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejaksaan Agung mengabaikan hasil penyelidikan Komnas HAM, sehingga tidak ada akuntabilitas negara pada kasus ini.

Akan tetapi, ingatan masyarakat tentang peristiwa di Rumoh Gedong sangatlah kuat. Paska Aceh, salah satu organisasi masyarakat sipil di Aceh terus mengorganisir komunitas korban untuk memperoleh hak-hak mereka. Sejak tahun 2017, para penyintas dan masyarakat sipil⁸ telah mengambil berbagai langkah untuk merawat cerita para penyintas dan menuntut keadilan atas pelanggaran yang mereka alami. Melalui musyawarah dengan komunitas korban, masyarakat sipil membantu komunitas membangun memorial mereka sendiri, yang berisikan informasi tentang kasus mereka dan doa untuk para korban.

7 Merawat Ingatan, Menjemput Keadilan, Ringkasan Eksekutif Kasus-Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, 2020.

8 Paska Aceh, KontraS Aceh, AJAR

Acara peringatan ditujukan untuk mengingat dan mengakui kontribusi para korban di Aceh, banyak di antaranya berasal dari Pidie, yang menderita rasa malu dan kehilangan. Para penyintas menuntut negara untuk tidak mengubur kebenaran tentang apa yang terjadi selama periode konflik. Monumen Rumoh Geudong yang diresmikan tahun 2018 terletak di depan bekas tempat penahanan yang digunakan selama berlangsungnya konflik. Monumen ini adalah langkah pertama dalam merubah bekas lokasi penyiksaan menjadi tempat memorial yang terbuka untuk umum untuk mengajarkan generasi muda agar tidak mengulangi kekerasan di masa lalu.⁹

Masyarakat sipil terus mengadakan acara peringatan secara teratur, sambil menampilkan pemutaran video, kuliah umum, doa bersama, dan eksibisi foto yang menunjukkan keuletan para penyintas. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dan kelompok korban terus mendorong Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh beserta pemerintah setempat agar mengakui keberadaan para korban Rumoh Geudong dan mengadopsi acara peringatan resmi sebagai pelajaran bersejarah di Aceh. Selain itu, proses hukum atas kasus tersebut juga perlu berlanjut.

Tragedi Simpang KKA, Aceh Utara

Pada tanggal 3 Mei 1999, puluhan orang meninggal dunia ketika personel melepaskan tembakan di sebuah persimpangan dekat pabrik pulp dan kertas bernama Kertas Kraft Aceh (KKA), atau dikenal sebagai Simpang KKA, di Aceh Utara dekat markas tentara. Insiden ini berawal dari berita bahwa seorang tentara dilaporkan hilang. Pada tanggal 30 April 1999, empat truk militer yang penuh berisi tentara menakut-nakuti warga sekitar, mencari rekan mereka di desa, menggerebek rumah-rumah, dan menginterogasi warga desa dengan cara kekerasan. Mereka juga mengancam warga bahwa kalau tentara rekan mereka tidak ditemukan, militer akan menyerang dan membakar desa. Ribuan orang kemudian melakukan demonstrasi besar di jalan utama untuk memprotes kekerasan tersebut dan



meminta perlindungan. Akan tetapi, militer justru memblokir area tersebut dan secara tiba-tiba, para tentara justru mulai menembaki kerumunan orang-orang yang tak bersenjata. Akibat peristiwa ini, 46 warga sipil tewas, 7 di antaranya adalah anak-anak; 156 warga lainnya menderita luka tembak dan 10 orang hilang.¹⁰

Dua reporter kebetulan berada di lokasi dan merekam insiden itu sehingga berita tentang kejadian ini sekarang sudah tersebar dan mendapat perhatian di tingkat nasional dan di dunia internasional. Kelompok korban dengan bantuan masyarakat sipil, termasuk KontraS Aceh, menuntut akuntabilitas dalam kasus ini. Di saat yang sama, komunitas penyintas mengadakan acara peringatan

9 Siaran pers: Mengenang Rumoh Geudong, menumbuhkan harapan akan kebenaran dan keadilan di Pidie, Aceh, Indonesia. <https://asia-ajar.org/2020/03/03/press-release-remembering-rumoh-geudong-raising-hope-for-truth-and-justice-in-pidie-Aceh-Indonesia/>

10 Database Koalisi LSM Aceh.

tahunan melalui penyelenggaraan upacara budaya/keagamaan.

Setelah proses perdamaian di Aceh, Badan Reintegrasi Aceh sebagai bagian dari pemerintah mendirikan monumen untuk tragedi Simpang KKA, sebuah inisiatif yang merupakan bagian dari proyek pembangunan pemerintah. Komunitas korban mengkritik pembangunan monumen ini karena dilakukan tanpa konsultasi dengan para korban, serta tidak terdapat pengakuan bagi para korban sendiri. Monumen tersebut disebut “Monumen martir”, yang hanya mengakui keberadaan para kombatan, yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan. Bertahun-tahun kemudian, setelah begitu banyak lobi baik formal maupun informal dengan pemerintah daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat Aceh, komunitas korban membangun monumen baru, tidak jauh dari monumen sebelumnya. Monumen baru ini merupakan simbol ingatan tentang orang-orang yang menjadi korban kekerasan di Simpang KKA, termasuk pengakuan atas nama-nama korban.

Kasus ini juga telah diselidiki oleh Komnas HAM. Tim ad hoc Komnas HAM menyimpulkan bahwa sudah terdapat bukti-bukti yang cukup dan memadai tentang dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap sekelompok orang, yang menewaskan 23 orang dan merekomendasikan penuntutan untuk 30 aparat militer yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹ Kesimpulan ini diserahkan kepada Kantor Kejaksaan Agung pada bulan Juni 2016. Namun seperti halnya pada kasus Rumoh Geudong, Kejaksaan Agung mengabaikan laporan Komnas HAM dan tidak ada satu orangpun yang didakwa atas kejahatan tersebut.

BAGAIMANA TANGGAL ATAU PERISTIWA PENTING DIPERINGATI DI RUANG PUBLIK OLEH PEJABAT NEGARA?

Tidak ada tanggal atau acara peringatan resmi untuk kasus ini.

BAGAIMANA TANGGAL ATAU PERISTIWA PENTING DIPERINGATI DI LINGKUNGAN SETEMPAT OLEH KOMUNITAS/ PERKUMPULAN KORBAN DAN PENYINTAS/ ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG BERPUSAT PADA KORBAN ATAU PENYINTAS?

Rumoh Geudong

Meskipun tempat ini dikenal umum sebagai lokasi penyiksaan di Aceh, tidak ada acara peringatan rutin sampai saat ini. Domisili para korban terpisah jauh sehingga konsolidasi menjadi tantangan besar. Selain itu, politikus dan pejabat militer sering memandang upaya merawat ingatan sebagai gangguan yang mengancam keamanan. Bahkan kelompok pelaku (militer) sering menyatakan bahwa mereka siap kembali berperang apabila ada pihak-pihak yang mengganggu perdamaian.

Paska Aceh, sebuah LSM lokal yang memperkuat komunitas di wilayah ini sejak 2017, menginisiasi sebuah acara peringatan. Dengan dukungan dari

11 Merawat Ingatan, Menjemput Keadilan, Ringkasan Eksekutif Kasus-Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, 2020.

kelompok masyarakat lainnya di provinsi ini dan di tingkat nasional, termasuk KontraS Aceh, LBH Aceh dan AJAR, Paska dan komunitas penyintas mengadakan acara peringatan di Rumoh Geudong bersamaan dengan Hari Kebenaran Internasional. Acara doa bersama ini dihadiri juga oleh anggota dewan perwakilan rakyat, kepala daerah, ketua KKR Aceh, perwakilan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dan beberapa pejabat lainnya. Pada acara peringatan ini, kelompok korban mengadakan pameran photo dan perayaan yang dihadiri oleh ratusan orang. Doa bersama ini juga merupakan upaya untuk pulih dari trauma atau menghapus dendam korban. Kombinasi pendekatan keagamaan dan keadilan transisi semacam ini merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi tekanan dari pasukan keamanan yang masih menghindar dari akuntabilitas masa lalu.

Salah satu korban berkata:

“Saya sedih dan terharu... Sedih karena ingat tentang anak saya yang dibawa ke Rumoh Geudong. Terharu karena saya bisa berdoa langsung di tempat di mana anak saya disiksa dan tewas, semoga dengan mengenang dan berdoa, saya bisa menenangkan hati saya dan bertemu lagi dengan anak saya di surga.”

Seorang penyintas dari Tiro, Pidie.

Tragedi Simpang KKA

Berlawanan dengan kisah tadi, tragedi Simpang KKA diperingati secara teratur oleh kelompok penyintas dengan dukungan masyarakat sipil di tingkat provinsi dan nasional, termasuk KontraS Aceh. Komunitas Korban Hak Asasi Manusia Aceh Utara (K2HAU) secara aktif mengadakan acara peringatan tahunan, doa bersama, mengenang para korban, dan secara konsisten menuntut akuntabilitas pada kasus ini. Pada peringatan di tahun 2021, salah satu korban menyatakan:

“Karenanya, kami mendorong Presiden sebagai pemegang kewenangan politik tertinggi di Indonesia untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dengan membentuk pengadilan hak asasi manusia untuk kasus ini dan segera memberikan pengakuan atas mekanisme KKR Aceh sebagaimana

disepakati pada MoU Helsinki.¹² Seorang penyintas dari Aceh Utara.

Pada tahun 2010 para korban dan organisasi masyarakat sipil melakukan sebuah proses pencarian kebenaran tidak resmi dan mengadakan dengar kesaksian publik atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Simpang KKA, sebagai bagian dari gerakan nasional yang disebut Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK).¹³

BAGAIMANA TANGGAL ATAU PERISTIWA PENTING DIPERINGATI DI ORGANISASI ANDA?

KontraS Aceh secara aktif mengambil inisiatif untuk mengenang pelanggaran masa lalu di Aceh. Inisiatif tersebut antara lain:

- Membuat acara **‘Lorong Ingatan’**, sebuah acara berisi pameran, diskusi, pemutaran film, dan instalasi seni sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil untuk melawan lupa terkait kekerasan di masa lalu. Pameran ini berkolaborasi dengan fotografer yang berpengalaman selama konflik dan beberapa seniman yang menggunakan instalasi dan mural sebagai media untuk mengungkapkan kedukaan akibat konflik melalui cara-cara yang berbeda.¹⁴
- **Museum Virtual Hak Asasi Manusia**. Melalui halaman online museumham.kontrasaceh.or.id, masyarakat umum dapat mengumpulkan informasi tentang konflik Aceh. Museum ini menyediakan dokumentasi, termasuk berbagai artikel berisi kisah-kisah dari konflik Aceh dan kisah-kisah para penyintas tentang kekerasan yang mereka alami. Museum virtual ini menyorot kegigihan para penyintas dan menggambarkan bagaimana mereka bertahan hidup sehari-hari pasca kekerasan yang mereka alami sepanjang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.

12 Warga peringati 22 tahun Peristiwa Simpang KKA <https://www.ajnn.net/news/warga-peringati-22-tahun-tragedi-simpang-kka/index.html>

13 AJAR dan KontraS Aceh, Keadilan Transisi, Studi Kasus di Indonesia <https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2020/09/English-Indonesia-Case-Study.pdf>

14 Lorong Ingatan. <https://kontrasaceh.or.id/tag/lorong-ingatan/>

- **Sekolah Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisi.** KontraS Aceh dan AJAR mengundang generasi muda untuk ikut serta pada sekolah HAM yang diadakan setiap tahun. Studi intensif ini mencakup pembelajaran tentang hak asasi manusia dan keadilan transisional baik berupa teori maupun praktek, termasuk sejarah konflik, dan pembelajaran tentang analisa serta diskusi mengenai beberapa insiden pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.
- Mendukung **inisiatif komunitas untuk merawat ingatan**, termasuk mendirikan memorial, misalnya untuk tragedi Krueng Suri di Aceh Jaya, di mana KontraS Aceh dan komunitas setempat membangun sebuah memorial untuk mengenang insiden penembakan brutal terhadap beberapa warga sipil di wilayah tersebut. Untuk kejahatan kemanusiaan Jamboe Keupok dan Simpang KKA, KontraS Aceh memfasilitasi kelompok penyintas dalam menghubungi pejabat setempat untuk membangun memorial komunitas.
- Mendukung **inisiatif komunitas untuk memperingati** tanggal-tanggal yang penting bagi mereka. Misalnya pada tragedi Simpang KKA, KontraS Aceh mengorganisir para korban, mendukung penyelenggaraan acara peringatan, dan menginisiasi monumen Simpang KKA. Selain itu diadakan pula dengar pendapat publik untuk kasus ini. Dukungan lain yaitu berupa peringatan tragedi pembantaian di Beutong Ateuh, Nagan Raya, yang menewaskan seorang pemuka agama bernama Tgk Bantaqiyah, dan puluhan santri yang menjadi muridnya selama konflik. Perayaan ini diadakan setiap tahun melalui doa bersama, kotbah keagamaan, dan perayaan bersama. Di Jambo Keupok, Aceh Selatan, KontraS Aceh ikut serta mengorganisir kelompok korban dari tragedi pembantaian Jambo Keupok dalam mengadakan acara peringatan secara teratur. Di Sedie Jadi, Bener Meriah, KontraS Aceh bersama dengan para penyintas serangan Kampung Kresek memperingati tragedi tersebut dengan mengunjungi makam para korban, memfasilitasi perbaikan makam, dan mengadakan doa bersama.

Bagi KontraS Aceh, peringatan ini penting untuk merawat ingatan tentang peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu, mengembangkan pendidikan dan mendorong negara agar bertanggung jawab memenuhi hak-hak korban melalui mekanisme



judisial dan non-judisial. Inisiatif ini juga dibuat dengan tujuan menjembatani kesenjangan pengetahuan dengan generasi muda terkait sejarah konflik. KontraS Aceh ingin menjadikan pengetahuan ini sebagai dasar pemikiran bagi generasi berikutnya di Aceh agar kekejaman serupa tidak terulang lagi di masa depan.

Dalam mengurangi ketegangan antara narasi resmi dan narasi para korban dan penyintas di seputar kesenjangan pada tanggal peringatan tertentu, KontraS Aceh memfasilitasi kelompok korban untuk menginisiasi memorial mereka sendiri

dengan dukungan dari pemerintah dan dewan perwakilan rakyat setempat. Di Simpang KKA, selain situs memorial yang dibangun pemerintah, komunitas korban membangun memorial lain dengan lebih banyak ruang untuk pengakuan bagi para korban. Di bawah monumen ini tertulis nama-nama korban yang tewas dalam pembantaian. Begitu pula di Jamboe Keupok, pemerintah mendirikan monumen tanpa melengkapi narasi tentang sejarah tragedi di situ, sehingga monumen ini dianggap ambigu dan ditolak oleh masyarakat umum. KontraS Aceh mendorong keterlibatan penuh komunitas korban agar memorial yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan para korban, tidak hanya untuk pencitraan seremonial pemerintah untuk menarik simpati publik.

PELAJARAN YANG DIAMBIL

Terlepas dari pengabaian negara dan tidak adanya niatan politik untuk memastikan akuntabilitas dan memberikan pengakuan kepada para korban, masyarakat sipil di Aceh dan seluruh Indonesia terus mengadakan berbagai inisiatif untuk merawat ingatan dan memberikan kontribusi untuk pelurusan sejarah. Dalam ketidakpastian adanya jaminan keadilan dan ketidakberulangan atas kekerasan itu sendiri, upaya untuk merawat ingatan harus dipandang sebagai inisiatif yang paling berakar mendalam pada komunitas korban yang perlu dihormati dan penting untuk diwujudkan melalui cara-cara alternatif.

Berikut adalah beberapa pelajaran yang teridentifikasi:

Keikutsertaan yang bermakna dari para korban-penyintas: Di kedua wilayah, komunitas korban berperan sangat aktif dalam merancang, berkolaborasi, dan menyusun kebutuhan para korban, yang termasuk di dalamnya mengadakan acara peringatan tahunan dan membangun memorial. Acara peringatan tidak resmi dengan kelompok penyintas seringkali berarti bahwa para penyintas ini memberikan partisipasi yang lebih besar dalam proses acara peringatan dan menerima pengakuan sosial dari masyarakat. Dengan demikian, mereka memperoleh rasa memiliki yang penting atas narasi mereka.

Mengakui narasi tidak resmi: Meskipun tidak ada narasi resmi dari negara, pendidikan kewarganegaraan disusun dengan sudut pandang luas masyarakat dan narasi kelompok korban. Acara rutin diadakan berbasis keagamaan dan tradisi sehingga memicu dukungan dari komunitas dan menyediakan kebenaran tidak resmi atas kejadian yang ada.

Dukungan penyembuhan bagi komunitas korban: acara rutin yang diselenggarakan LSM dan komunitas korban merupakan opsi alternatif untuk “keadilan”, sehingga menjadi proses penyembuhan bagi korban dan memunculkan dukungan sesama antar korban.

Dukungan dari lembaga pemerintah dan dewan perwakilan setempat: meskipun pemerintah provinsi tidak memiliki niatan politik, tetap penting artinya untuk melibatkan lembaga pemerintah dan dewan perwakilan setempat untuk mendorong mereka agar lebih banyak bertanggung jawab terhadap komunitasnya.

Inisiatif organisasi masyarakat sipil yang memfasilitasi keterlibatan publik secara lebih luas. Beberapa organisasi masyarakat sipil yang memperingati tanggal-tanggal penting dengan berbagi pengalaman korban melalui konferensi, diskusi kelompok terfokus, dan kampanye-kampanye lain. Mereka juga terlibat dalam inisiatif reformasi kebijakan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekejaman di masa depan.

MENGIDENTIFIKASI PRAKTEK-PRAKTEK TERBAIK YANG MEMBANTU MEMBANGUN BUDAYA INGATAN YANG INKLUSIF DAN MENCAPAI SASARAN LUAS REKONSILIASI, PENGAKUAN KEJAHATAN, PENCARIAN KEBENARAN, PENDIDIKAN UNTUK GENERASI MASA DEPAN,

DAN KETIDAKBERULANGAN

Pesan-pesan dalam peringatan peristiwa tragedi di berbagai lokasi konflik mengandung dorongan sipil terhadap pemerintah. Ini terus dilakukan karena belum pernah ada tindak lanjut dari negara. Tekanan serupa juga disuarakan dengan mendorong pembentukan KKR Aceh. Komunitas dan berbagai organisasi secara bersama-sama mendorong agar KKR ditetapkan sebagai forum untuk mengungkapkan kebenaran tentang fakta-fakta kekerasan masa lalu dan pemulihan para korban. Informasi mengenai kegiatan untuk memperingati peristiwa masa lalu dalam bentuk pameran, napak tilas sejarah, dan sebagainya juga disebar dalam pernyataan pers dan materi media sosial, sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa sejumlah elemen sipil bersama-sama dengan para penyintas dan komunitas orang muda masih

memiliki inisiatif untuk melawan lupa akan masa lalu dan memperjuangkan pentingnya mengedepankan perspektif pemulihan korban.

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh KontraS Aceh belum mencapai titik perjanjian mengenai narasi resmi yang dapat diterima oleh korban dan negara, karena belum ada sejarah resmi terkait konflik Aceh Aceh. Bahkan untuk kasus yang sudah diputuskan di pengadilan, misalnya kasus pembantaian Beutong Ateuh, pemerintah masih belum memasukkan fakta-fakta pada kasus ini ke dalam narasi resmi yang dapat diterima kedua pihak.

Komunitas korban dan berbagai organisasi masyarakat sipil sudah lama mendorong tema ini. Akan tetapi, pemerintah, terutama lembaga militer, cenderung menghindari wacana tersebut, bahkan sekalipun mereka memiliki narasi-narasi yang berbeda terkait kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Pihak militer sepertinya tidak ingin narasi-narasi tersebut keluar ke masyarakat umum dan didebat secara terbuka.